



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Raya El Tari Nomor 52 Kupang

---

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 25 /KEP/HK/2022**

TENTANG

TIM PENGELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2022

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Pasal 75 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di daerah provinsi dalam melaksanakan tugasnya memiliki fungsi pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan Sumber Daya Manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah;
  - b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk tim pengelola pengadaan barang dan jasa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengelola Pengadaan Barang Dan Jasa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Pengelola Pengadaan Barang Dan Jasa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA** : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melakukan pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
- KETIGA** : Susunan anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022 serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 20 JANUARI 2022

*W.a.n.* GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, *Re*



*Ir.* **BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesiadi Jakarta;
2. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
6. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala BPKP Perwakilan Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 35 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 20 JANUARI 2022**TENTANG SUSUNAN ANGGOTA TIM PENGELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2022**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>	<b>PERANGKAT DAERAH BINAAN</b>
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	a. mengarahkan kebijakan umum pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT; b. melakukan pembinaan dan pengendalian modernisasi pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT; dan c. mendorong percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.	Seluruh Perangkat Daerah Lingkup Pemprov. NTT
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	a. mengarahkan kebijakan umum pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT; b. melakukan pembinaan dan pengendalian modernisasi pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT; dan c. mendorong percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.	Seluruh Perangkat Daerah Lingkup Pemprov. NTT

3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengarahkan kebijakan umum pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;</li> <li>b. melakukan pembinaan dan pengendalian modernisasi pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT; dan</li> <li>c. mendorong percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.</li> </ul>	Seluruh Perangkat Daerah Lingkup Pemprov. NTT
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Pengarah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengarahkan kebijakan umum pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;</li> <li>b. melakukan pembinaan dan pengendalian modernisasi pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT; dan</li> <li>c. mendorong percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.</li> </ul>	Seluruh Perangkat Daerah Lingkup Pemprov. NTT
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Pengarah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengarahkan kebijakan umum pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;</li> <li>b. melakukan pembinaan dan pengendalian modernisasi pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT; dan</li> <li>c. mendorong percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.</li> </ul>	Seluruh Perangkat Daerah Lingkup Pemprov. NTT

6.	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Pengarah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengarahkan kebijakan umum pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;</li> <li>b. melakukan pembinaan dan pengendalian modernisasi pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT; dan</li> <li>c. mendorong percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.</li> </ul>	Seluruh Perangkat Daerah Lingkup Pemprov. NTT
7.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Wakil Pengarah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengarahkan kebijakan umum pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;</li> <li>b. melakukan pembinaan dan pengendalian modernisasi pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT; dan</li> <li>c. mendorong percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.</li> </ul>	Seluruh Perangkat Daerah Lingkup Pemprov. NTT
8.	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Penanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengkoordinasikan pembagian tugas bagi seluruh Tim Pengelola dan Pembina Pengadaan Barang dan Jasa pada rapat pembahasan/asistensi anggaran TAPD;</li> <li>b. melakukan pembinaan dan pengendalian modernisasi pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;</li> <li>c. mendorong percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT; dan</li> <li>d. mengawasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.</li> </ul>	Seluruh Perangkat Daerah Lingkup Pemprov. NTT

9.	Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. memimpin pembinaan dan pengelolaan PBJ strategis dan non strategis;</li> <li>b. melaksanakan Koordinasi Rapat Pembahasan Anggaran/Perubahan Anggaran bersama TAPD;</li> <li>c. memimpin pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data Rencana Umum Pengadaan (RUP);</li> <li>d. memimpin pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data progres pengadaan strategis dan non strategis pada PD Lingkup Prov. NTT;</li> <li>e. memimpin pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data <i>e-contract</i> dan pelaksanaan kontrak;</li> <li>f. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan modernisasi pengadaan dan pelaksanaan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi; dan</li> <li>g. melaporkan hasil laporan bulanan pembinaan dan pengelolaan pengadaan barang/jasa terhadap seluruh PD Lingkup Pemerintah Provinsi NTT.</li> </ul>	Seluruh Perangkat Daerah Lingkup Pemprov. NTT
10.	Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Wakil Ketua I	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. membantu Ketua dalam memimpin pembinaan dan pengelolaan PBJ strategis dan non strategis;</li> <li>b. membantu Ketua dalam melaksanakan Koordinasi Rapat Pembahasan Anggaran/Perubahan Anggaran bersama TAPD;</li> <li>c. membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data Rencana Umum Pengadaan (RUP);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT</li> <li>2) Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT</li> <li>3) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT</li> <li>4) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT</li> </ul>

			<p>d. membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data progres pengadaan strategis dan non strategis pada PD Lingkup Provinsi NTT;</p> <p>e. membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data <i>e-contract</i> dan pelaksanaan kontrak; dan</p> <p>f. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan modernisasi pengadaan dan pelaksanaan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi.</p>	<p>5) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT</p> <p>6) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT</p> <p>7) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT</p> <p>8) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT</p> <p>9) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT</p> <p>10) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT</p> <p>11) Biro Organisasi Setda Provinsi NTT</p> <p>12) Badan Penghubung Provinsi NTT</p> <p>13) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT</p> <p>14) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT</p> <p>15) Dinas Sosial Provinsi NTT</p>
--	--	--	--	--

11.	Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Wakil Ketua II	<p>a. membantu Ketua dalam memimpin pembinaan dan pengelolaan PBJ strategis dan non strategis;</p> <p>b. membantu Ketua dalam melaksanakan Koordinasi Rapat Pembahasan Anggaran/Perubahan Anggaran bersama TAPD;</p> <p>c. membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data Rencana Umum Pengadaan (RUP);</p> <p>d. membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data progres pengadaan strategis dan non strategis pada PD Lingkup Provinsi NTT;</p> <p>e. membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data <i>e-contract</i> dan pelaksanaan kontrak; dan</p> <p>f. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan modernisasi pengadaan dan pelaksanaan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Biro Umum Setda Provinsi NTT</li> <li>2) Dinas Peternakan Provinsi NTT</li> <li>3) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT</li> <li>4) Inspektorat Provinsi NTT</li> <li>5) Dinas Kesehatan Provinsi NTT</li> <li>6) Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT</li> <li>7) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT</li> <li>8) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTT</li> <li>9) Dinas Perhubungan Provinsi NTT</li> <li>10) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT</li> <li>11) Biro Hukum Setda Provinsi NTT</li> <li>12) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT</li> </ol>
-----	---	----------------	--	---

12.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua III	<p>a. membantu Ketua dalam memimpin pembinaan dan pengelolaan PBJ strategis dan non strategis;</p> <p>b. membantu Ketua dalam melaksanakan Koordinasi Rapat Pembahasan Anggaran/Perubahan Anggaran bersama TAPD;</p> <p>c. membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data Rencana Umum Pengadaan (RUP);</p> <p>d. membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data progres pengadaan strategis dan non strategis pada PD Lingkup Provinsi NTT;</p> <p>e. membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data <i>e-contract</i> dan pelaksanaan kontrak; dan</p> <p>f. membantu Ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan modernisasi pengadaan dan pelaksanaan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi.</p>	<p>1) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT</p> <p>2) Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi NTT Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT</p> <p>3) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT</p> <p>4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT</p> <p>5) Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang</p> <p>6) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT</p> <p>7) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT</p> <p>8) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT</p> <p>9) Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT</p> <p>10) Biro Administasi Pimpinan Setda Provinsi NTT</p>
-----	--	-----------------	---	---

				11) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT
13.	Lucius W. Luly, S.STP, MA/ Analisis Kebijakan Ahli Muda/ Subkoordinator Pelaksanaan Tugas Pengelolaan Strategi PBJ pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Koordinator Teknis I	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengelolaan PBJ strategis dan non strategis;</li> <li>b. mengikuti Rapat Pembahasan Anggaran/Perubahan Anggaran bersama TAPD;</li> <li>c. memfasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data Rencana Umum Pengadaan (RUP);</li> <li>d. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data progres pengadaan strategis dan non strategis pada PD Lingkup Provinsi NTT;</li> <li>e. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data <i>e-contract</i> dan pelaksanaan kontrak;</li> <li>f. melaksanakan kegiatan modernisasi pengadaan dan pelaksanaan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi; dan</li> <li>g. menghimpun, membuat dan menyusun laporan bulanan pembinaan dan pengelolaan pengadaan barang/jasa pada PD binaannya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT</li> <li>2) Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT</li> <li>3) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT</li> <li>4) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT</li> <li>5) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT</li> <li>6) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT</li> <li>7) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT</li> <li>8) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT</li> <li>9) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT</li> <li>10) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT</li> </ul>

				11) Biro Organisasi Setda Provinsi NTT 12) Badan Penghubung Provinsi NTT 13) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT 14) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT 15) Dinas Sosial Provinsi NTT
14.	Mardiosy E. Rihi Ratu, SH/ Analisis Kebijakan Ahli Muda/ Subkoordinator Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan PBJ pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Koordinator Teknis II	a. memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengelolaan PBJ strategis dan non strategis; b. mengikuti Rapat Pembahasan Anggaran/Perubahan Anggaran bersama TAPD; c. memfasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data Rencana Umum Pengadaan (RUP); d. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data progres pengadaan strategis dan non strategis pada PD Lingkup Provinsi NTT; e. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data <i>e-contract</i> dan pelaksanaan kontrak; f. melaksanakan kegiatan modernisasi pengadaan dan pelaksanaan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi; dan	1) Biro Umum Setda Provinsi NTT 2) Dinas Peternakan Provinsi NTT 3) Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT 4) Inspektorat Provinsi NTT 5) Dinas Kesehatan Provinsi NTT 6) Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT 7) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT 8) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTT

			g. menghimpun, membuat dan menyusun laporan bulanan pembinaan dan pengelolaan pengadaan barang/jasa pada PD binaannya.	9) Dinas Perhubungan Provinsi NTT 10) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT 11) Biro Hukum Setda Provinsi NTT 12) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT
15.	Dominika O. G. Pawe, SE/ Analisis Kebijakan Ahli Muda/ Subkoordinator Pelaksanaan Tugas Pemantauan dan Evaluasi PBJ pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Koordinator Teknis III	a. memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengelolaan PBJ strategis dan non strategis; b. mengikuti Rapat Pembahasan Anggaran/Perubahan Anggaran bersama TAPD; c. memfasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data Rencana Umum Pengadaan (RUP); d. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data progres pengadaan strategis dan non strategis pada PD Lingkup Prov. NTT; e. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data <i>e-contract</i> dan pelaksanaan kontrak; f. melaksanakan kegiatan modernisasi pengadaan dan pelaksanaan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi; dan g. menghimpun, membuat dan menyusun laporan bulanan pembinaan dan pengelolaan pengadaan barang/jasa pada PD binaannya.	1) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT 2) Biro Pengadaan Barang Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT 3) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT 4) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT 5) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT 6) Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang 7) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT

				8) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT 9) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT 10) Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT 11) Biro Administasi Pimpinan Setda. Provinsi NTT 12) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT
16.	Demy Ku, SH/ Analis Kebijakan Ahli Muda/ Subkoordinator Pelaksanaan Tugas Pengelolaan SPSE pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Koordinator Administrasi I	a. memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengelolaan PBJ strategis dan non strategis; b. mengikuti Rapat Pembahasan Anggaran/Perubahan Anggaran bersama TAPD; c. memfasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data Rencana Umum Pengadaan (RUP); d. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data progres pengadaan strategis dan non strategis pada PD Lingkup Provinsi NTT; e. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data <i>e-contract</i> dan pelaksanaan kontrak;	1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT 2) Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT 3) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT 4) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT 5) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT

			<p>f. melaksanakan kegiatan modernisasi pengadaan dan pelaksanaan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi; dan</p> <p>g. menghimpun data dan melaporkannya ke Koordinator Teknis untuk penyusunan laporan bulanan pembinaan dan pengelolaan pengadaan barang/jasa.</p>	
17.	Kollo Thalib, SP/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	<p>a. memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengelolaan PBJ strategis dan non strategis;</p> <p>b. mengikuti Rapat Pembahasan Anggaran/Perubahan Anggaran bersama TAPD;</p>	<p>1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT</p> <p>2) Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT</p>
18.	Kornelis Kopong Bolen, SE, M.Ak/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	<p>c. memfasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data Rencana Umum Pengadaan (RUP);</p> <p>d. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data progres pengadaan strategis dan non strategis pada PD Lingkup Provinsi NTT;</p> <p>e. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data <i>e-contract</i> dan pelaksanaan kontrak;</p> <p>f. melaksanakan kegiatan modernisasi pengadaan dan pelaksanaan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi; dan</p> <p>g. menghimpun data dan melaporkannya ke Koordinator Teknis untuk penyusunan laporan bulanan pembinaan dan pengelolaan pengadaan barang/jasa.</p>	<p>3) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT</p> <p>4) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT</p> <p>5) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT</p>

19.	Godehardus S. D. Hatul, SE/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	a. memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengelolaan PBJ strategis dan non strategis; b. mengikuti Rapat Pembahasan Anggaran/Perubahan Anggaran bersama TAPD;	1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT 2) Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT 3) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT 4) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT 5) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT
20.	Petrus Lemba, SE/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	c. memfasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data Rencana Umum Pengadaan (RUP);	
21.	Magdalena Mensiana, A.Md/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	d. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data progres pengadaan strategis dan non strategis pada PD Lingkup Provinsi NTT;	
22.	Hanok Melkianus Manesi, SH/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	e. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data <i>e-contract</i> dan pelaksanaan kontrak;	
23	Rufaida Ema Wokan, S.Ak/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	f. melaksanakan kegiatan modernisasi pengadaan dan pelaksanaan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi; dan g. menghimpun data dan melaporkannya ke Koordinator Teknis untuk penyusunan laporan bulanan pembinaan dan pengelolaan pengadaan barang/jasa.	
24.	Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Pengembangan Sistem Informasi pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Koordinator Administrasi II	a. memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengelolaan PBJ strategis dan non strategis; b. mengikuti Rapat Pembahasan Anggaran/Perubahan Anggaran bersama TAPD;	1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi NTT 2) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT 3) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Prov NTT 4) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT
25.	Yustin Elvry Toka, ST/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	c. memfasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data Rencana Umum Pengadaan (RUP);	
26.	Octovianus Gollu Tena, ST/ Pengelola PBJ Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	d. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data progres pengadaan strategis dan non strategis pada PD Lingkup Provinsi NTT;	

27.	Thobias R. Foenale, SE/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	e. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data <i>e-contract</i> dan pelaksanaan kontrak;	5) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT
28.	Alexandro Benigno Lake, ST/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	f. melaksanakan kegiatan modernisasi pengadaan dan pelaksanaan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi; dan	6) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi NTT
29.	Leoncio Theresa Araujo/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	g. menghimpun data dan melaporkannya ke Koordinator Teknis untuk penyusunan laporan bulanan pembinaan dan pengelolaan pengadaan barang/jasa.	7) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT
30.	Maria Anabela Dos Reis/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	h. memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengelolaan PBJ strategis dan non strategis;	8) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT
31	Anggelina Sudi, S.Th/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	i. mengikuti Rapat Pembahasan Anggaran/ Perubahan Anggaran bersama TAPD;	9) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT
32.	Emerensiana Sonia Cristye Kina Ola, SE/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	j. memfasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data Rencana Umum Pengadaan (RUP);	10) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT
			k. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data progres pengadaan strategis dan non strategis pada PD Lingkup Provinsi NTT;	
			l. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data <i>e-contract</i> dan pelaksanaan kontrak;	
			m. melaksanakan kegiatan modernisasi pengadaan dan pelaksanaan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi; dan	
			n. menghimpun data dan melaporkannya ke Koordinator Teknis untuk penyusunan laporan bulanan pembinaan dan pengelolaan pengadaan barang/jasa.	

33.	Yanes G. Panie, S.STP, M.Pub.Pol/ Analisis Kebijakan Ahli Muda/ Subkoordinator Pelaksanaan Tugas Pengelolaan Informasi PBJ pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Koordinator Administrasi III	a. memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengelolaan PBJ strategis dan non strategis; b. mengikuti Rapat Pembahasan Anggaran/Perubahan Anggaran bersama TAPD; c. memfasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data Rencana Umum Pengadaan (RUP); d. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data progres pengadaan strategis dan non strategis pada PD Lingkup Provinsi NTT; e. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data <i>e-contract</i> dan pelaksanaan kontrak; f. melaksanakan kegiatan modernisasi pengadaan dan pelaksanaan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi; dan g. menghimpun data dan melaporkannya ke Koordinator Teknis untuk penyusunan laporan bulanan pembinaan dan pengelolaan pengadaan barang/jasa.	1) Biro Organisasi Setda Provinsi NTT 2) Badan Penghubung Provinsi NTT 3) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT 4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT 5) Dinas Sosial Provinsi NTT
34.	Leonardo A. Z. R. Langoday, S.Kom/ Pengelola PBJ Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota		
35.	Teodora Lue/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota		
36.	Drs. Yaved Loe/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota		
37.	Emiliana Fatima Manek/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota		
38.	Denvinoputra E. Habid, BA (HONS)/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota		
39.	Arisanti Meliani, SE/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota		
40.	James. P. Nenobais, S.STP/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota		

41.	Indri Mayasari Susetyo, ST/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	a. memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengelolaan PBJ strategis dan non strategis; b. mengikuti Rapat Pembahasan Anggaran/Perubahan Anggaran bersama TAPD;	1) Biro Organisasi Setda Provinsi NTT 2) Badan Penghubung Provinsi NTT 3) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT
42.	Aurick Ardy Firdaus Sigit, S.Ds/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	c. memfasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data Rencana Umum Pengadaan (RUP); d. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data 18progress pengadaan strategis dan non strategis pada PD Lingkup Provinsi NTT; e. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data <i>e-contract</i> dan pelaksanaan kontrak; f. melaksanakan kegiatan modernisasi pengadaan dan pelaksanaan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi; dan g. menghimpun data dan melaporkannya ke Koordinator Teknis untuk penyusunan laporan bulanan pembinaan dan pengelolaan pengadaan barang/jasa.	4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT 5) Dinas Sosial Provinsi NTT
43.	Kepala Sub Bagian Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Koordinator Administrasi IV	a. memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengelolaan PBJ strategis dan non strategis; b. mengikuti Rapat Pembahasan Anggaran/Perubahan Anggaran bersama TAPD;	1) Biro Umum Setda Provinsi NTT 2) Dinas Peternakan Provinsi NTT

44.	Anwar Harijana, S.Si/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	<p>c. memfasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data Rencana Umum Pengadaan (RUP);</p> <p>d. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data progres pengadaan strategis dan non strategis pada PD Lingkup Prov. NTT;</p> <p>e. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data <i>e-contract</i> dan pelaksanaan kontrak;</p> <p>f. melaksanakan kegiatan modernisasi pengadaan dan pelaksanaan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi; dan</p> <p>g. menghimpun data dan melaporkannya ke Koordinator Teknis untuk penyusunan laporan bulanan pembinaan dan pengelolaan pengadaan barang/jasa.</p>	<p>3) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT</p> <p>4) Inspektorat Provinsi NTT</p>
45.	Maglon Teuf, S.Kom/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota		
46.	Julita Marleni Laning, A.Md/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota		
47.	Rivantius Foyh, S.Kom/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota		
48.	Riky Dedison Rihi Pake, S.Farm. Apt/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota		
49.	Hubertus Haji, SE / Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota		
50.	Emanuel Tonapa, S.Tr.IP/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota		

51.	Yohanes K. Kaha, S.Sos, MPA/ Analisis Kebijakan Ahli Muda/ Subkoordinator Pelaksanaan Tugas Pembinaan Kelembagaan PBJ pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Koordinator Administrasi V	<p>a. memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengelolaan PBJ strategis dan non strategis;</p> <p>b. mengikuti Rapat Pembahasan Anggaran/Perubahan Anggaran bersama TAPD;</p> <p>c. memfasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data Rencana Umum Pengadaan (RUP);</p> <p>d. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data progres pengadaan strategis dan non strategis pada PD Lingkup Prov. NTT;</p> <p>e. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data <i>e-contract</i> dan pelaksanaan kontrak;</p> <p>f. melaksanakan kegiatan modernisasi pengadaan dan pelaksanaan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi; dan</p> <p>g. menghimpun data dan melaporkannya ke Koordinator Teknis untuk penyusunan laporan bulanan pembinaan dan pengelolaan pengadaan barang/jasa.</p>	<p>1) Dinas Kesehatan Provinsi NTT</p> <p>2) Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT</p> <p>3) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT</p> <p>4) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTT</p>
52.	Susana Irene H. Lukas, ST, M.Si/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota		
53.	Suharto Robert Kenedy/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota		
54.	Semuel S. A. E. Toelle/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota		
55.	Ignatius Origenes Bewat, A.Md/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota		
56.	Herlince Pollo, S.Pd/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota		
57.	Albert Adoe, S.Tr.IP/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota		
58.	Aries Sudharmono, S.Pt/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota		
59.	Rofinus Raja Waking / Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota		

60.	Sofi J. Messakh, SE/ Analis Kebijakan Ahli Muda/ Subkoordinator Pelaksanaan Tugas Pendampingan, Konsultasi dan Bimtek pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Koordinator Administrasi VI	a. memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengelolaan PBJ strategis dan non strategis; b. mengikuti Rapat Pembahasan Anggaran/Perubahan Anggaran bersama TAPD; c. memfasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data Rencana Umum Pengadaan (RUP); d. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data progres pengadaan strategis dan non strategis pada PD Lingkup Prov. NTT;	1) Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2) Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT 3) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT 4) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTT
61.	Frans Budiman Johannes, S.Sos., M.Si/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	e. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data Rencana Umum Pengadaan (RUP); f. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data <i>e-contract</i> dan pelaksanaan kontrak;	1) Dinas Perhubungan Provinsi NTT 2) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT 3) Biro Hukum Setda Provinsi NTT 4) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT
62.	Patrisia Yulistriani Djami, ST/ Pengelola PBJ Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	f. melaksanakan kegiatan modernisasi pengadaan dan pelaksanaan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi; dan	
63.	Siprianus Talan/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	g. menghimpun data dan melaporkannya ke Koordinator Teknis untuk penyusunan laporan bulanan pembinaan dan pengelolaan pengadaan barang/jasa.	
64.	Zet Amnifu, ST/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota		
65.	Septian Maradona Tanamal/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota		
66.	Boby Lodovic Da Costa, S.Kom/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota		
67.	Mega Olyvia Clarita Manu, S.Ab/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota		

68.	Wilibrodus Wora, SE, M.Ec. Dev/ Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Koordinator Administrasi VII	a. memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengelolaan PBJ strategis dan non strategis; b. mengikuti Rapat Pembahasan Anggaran/Perubahan Anggaran bersama TAPD; c. memfasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data Rencana Umum Pengadaan (RUP); d. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data progres pengadaan strategis dan non strategis pada PD Lingkup Provinsi NTT; e. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data <i>e-contract</i> dan pelaksanaan kontrak; f. melaksanakan kegiatan modernisasi pengadaan dan pelaksanaan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi; dan g. menghimpun data dan melaporkannya ke Koordinator Teknis untuk penyusunan laporan bulanan pembinaan dan pengelolaan pengadaan barang/jasa.	1) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT 2) Biro Pengadaan Barang Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT 3) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT 4) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT
69.	Jans E. Z. Sibui, SE/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota		
70.	Oktovianus Robinson Bire, ST/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota		
71.	Jacobis Ferdinand Zacharias/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota		
72.	Yani Lakisina/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota		
73.	Yulianti Rosiana Pandie/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota		

74.	Kasubid. Penyusunan Anggaran Bidang Administrasi Umum pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Koordinator Administrasi VIII	a. memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengelolaan PBJ strategis dan non strategis; b. mengikuti Rapat Pembahasan Anggaran/Perubahan Anggaran bersama TAPD;	1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT 2) Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang 3) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT 4) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT
75.	Samuel Arie Parera, ST/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	c. memfasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data Rencana Umum Pengadaan (RUP);	
76.	Dance Markus Benyamin Pisdon, SE/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	d. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data progres pengadaan strategis dan non strategis pada PD Lingkup Provinsi NTT;	
77.	Joab Beda, S.Sos/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	e. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data <i>e-contract</i> dan pelaksanaan kontrak;	
78.	Gregorius Saverius Heran Leuehag/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT		f. melaksanakan kegiatan modernisasi pengadaan dan pelaksanaan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi; dan g. menghimpun data dan melaporkannya ke Koordinator Teknis untuk penyusunan laporan bulanan pembinaan dan pengelolaan pengadaan barang/jasa.	

79.	Kasubid. Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Koordinator Administrasi IX	a. memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengelolaan PBJ strategis dan non strategis;	1) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT 2) Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT 3) Biro Administasi Pimpinan Setda Provinsi NTT 4) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT
80.	Arabinaya L. Lumbu Lamba, S.Pt, MM/ Pengelola PBJ Ahli Madya pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	b. mengikuti Rapat Pembahasan Anggaran/Perubahan Anggaran bersama TAPD;	
81.	Jovita Juang/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT		c. memfasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data Rencana Umum Pengadaan (RUP);	
82.	Desry N. Leka/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	d. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data progres pengadaan strategis dan non strategis pada PD Lingkup Provinsi NTT;	
83.	Mikael Sogan, A.Md/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	e. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data <i>e-contract</i> dan pelaksanaan kontrak;	
84.	Arisanti Meliani, SE/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	f. melaksanakan kegiatan modernisasi pengadaan dan pelaksanaan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi; dan g. menghimpun data dan melaporkannya ke Koordinator Teknis untuk penyusunan laporan bulanan pembinaan dan pengelolaan pengadaan barang/jasa.	

W.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, *fe*



**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014